

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan zaman dalam era globalisasi yang semakin modern saat ini mengharuskan setiap orang melakukan pergerakan dengan cepat hal ini menyebabkan semakin berkembangnya jenis-jenis alat transportasi berbasis motor, baik alat transportasi umum maupun pribadi, banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia mengakibatkan kebutuhan konsumen akan Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat besar khususnya bagi konsumen yang menggunakan kendaraan bermotor.

Bahan bakar minyak di singkat dengan (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. BBM merupakan suatu jenis bahan bakar yang dihasilkan melalui proses pengilangan minyak mentah saat ini BBM telah menjadi kebutuhan pokok dalam kegiatan rumah tangga maupun industri, terlebih dalam kegiatan transportasi. dalam kehidupan sehari-hari BBM untuk kendaraan bermotor lebih dikenal dengan istilah Bensin. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor sebagai media transportasi baik umum maupun pribadi, menyebabkan kebutuhan BBM juga meningkat. Hal tersebut dikarenakan BBM merupakan sumber energi yang diperlukan untuk dapat menggerakkan mesin kendaraan sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Pasal 2 dan 3, bahan bakar minyak di Indonesia dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu:

- a. Jenis BBM Tertentu, terdiri atas Minyak Tanah dan Minyak Solar
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan, merupakan BBM jenis Premium yang hanya disubsidi untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali.
- c. Jenis BBM Umum, terdiri atas seluruh jenis BBM kecuali pada poin a dan b.<sup>1</sup>

Jenis BBM Umum yang biasa disebut dengan Bahan Bakar Khusus (BBK) merupakan BBM Non-PSO (Public Service Obligation) atau Non-Subsidi. Harga BBM non subsidi lebih mahal daripada BBM bersubsidi. Namun, kualitas yang diberikan jauh lebih baik daripada BBM bersubsidi. hampir seluruh jenis BBK telah mengantongi standar emisi euro yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu RON 90 ke atas. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin mahal bahan bakar tersebut. Bagi konsumen yang memiliki uang lebih tidaklah sulit membeli BBM dengan RON lebih dari 90 (Pertamax Series). Tetapi, bagi sebagian masyarakat harga yang ditetapkan masih terlalu tinggi. Masyarakat mendambakan adanya bahan bakar berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau.

Oleh karena itu sangatlah penting pengadaan BBM ini diadakan dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara”. Dengan adanya peraturan ini pemerintah membuat sebuah perusahaan untuk mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu PT. Pertamina. Semenjak didirikan pada tanggal 10

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Desember 1957 PT. Pertamina diberikan hak pengelolaan sepenuhnya oleh pemerintah, hingga pada tahun 1999 dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas dasar peraturan tersebut PT. Pertamina tidak lagi diberikan hak khusus dalam perdagangan dan pengelolaan BBM.

Kegiatan pembelian dan penjualan BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada masyarakat merupakan kegiatan usaha hilir, yang lebih menekankan ke sektor niaga, kegiatan penjualan dan pembelian BBM tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) No. 22 Tahun 2001 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang dirumuskan sebagai berikut “Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga dan gas bumi melalui pipa”. Dalam persyaratannya kegiatan ini dilaksanakan dengan cara izin usaha dari pemerintah.

Pengusaha diperbolehkan untuk dapat melakukan kegiatan pembelian dan penjualan BBM, mengakibatkan semakin banyak SPBU yang ada di Indonesia ditambah lagi dengan datangnya perusahaan asing yang datang ke Indonesia pada bulan Oktober 2005 seperti PT. Shell Indonesia yang menjadi perusahaan swasta pertama yang membuka SPBU di Indonesia dan disusul dengan adanya PT. Total Indonesia dan PT. Petronas Indonesia yang masuk ke Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam kegiatan penyaluran kepada konsumen hilir Migas PT. Pertamina dapat berbentuk Mobile Bunker Agent (MBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Premium Solar Package Dealer

---

<sup>2</sup> Gentur P, 2014, *Menteri ESDM minta SPBU Swasta Saingi Dominasi Pertamina*, Diunduh dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141216065138-85-18365/menteri-esdm-minta-spbu-swasta-saingi-dominasi-pertamina/>, Diakses pada tanggal 11-04-2018

(PSPD), Agen Minyak Tanah (AMT), pool konsumen atau bentuk penyalur lainnya. Dalam industri penyaluran BBM ke konsumen SPBU adalah tempat yang paling populer dan sering dikunjungi konsumen saat membutuhkan Bahan Bakar Minyak untuk bahan bakar kendaraan mereka.

Dalam perubahan kebijakan monopoli ke era perdagangan bebas penyaluran minyak dan gas bumi ke masyarakat salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan daya saing yang menuntut kualitas lebih tinggi atau layanan lebih baik. Dengan kemunculan pesaing baru di dunia hilir penyaluran Migas membuat Pertamina menjadi lebih kompetitif dan professional, dimana kualitas dan pelayanan akan memegang peran penting untuk merebut hati dan kepercayaan konsumen. Dalam upaya merubah kearah yang lebih baik itu PT. Pertamina menetapkan beberapa kebijakan sebagai upaya perbaikan kualitas dan pelayanan, diantaranya dengan menetapkan margin share yang berbeda tergantung kualitas pelayanan dari mitranya.

Adapun kualitas tersebut di golongkan pada dua standar pelayanan Pertamina, diantaranya<sup>3</sup>:

#### 1. Pertamina Way

Pertamina meluncurkan program dengan penerapan standart pelayanan yang terdiri dari 5 elemen, yakni pelayanan staff yang telah terlatih dan termotivasi, jaminan kualitas dan kuantitas, fasilitas dan peralatan yang terawat dengan baik, memiliki format fisik yang konsisten, dan penawaran produk serta pelayanan bernilai tambah dengan operator yang selalu menerapkan 3S (Salam, Senyum, Sapa).

#### 2. Pasti PAS

---

<sup>3</sup> Sumber : <http://agenpelumas.com/standar-operasional-pelayanan-pertamina/> diakses 09 juni 2018 pukul 20.30

SPBU yang mendapat sertifikat Pasti PAS dari auditor independen. Adanya sertifikat ini diharapkan SPBU dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diharapkan konsumen akan mendapatkan BBM yang berkualitas dengan takaran yang pas, saat ini konsumen dapat melihat logo Pasti PAS di beberapa SPBU.

Dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan tersebut hingga saat ini masih ada saja keluhan dari masyarakat terkait pemenuhan hak-hak konsumen SPBU yang di langgar oleh SPBU baik dari SPBU pertamina maupun SPBU Mitra Pertamina, diantara keluhan yang di sampaikan adalah dugaan mencurangi takaran dengan cara meniru atau memalsukan BBM jenis-jenis tertentu tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pengurangan takaran, masalah pengembalian uang, pembulatan harga, informasi, fasilitas minim dan masalah lain yang dikeluhkan masyarakat di SPBU.

Di tengah-tengah masyarakat isu mengenai kecurangan dengan memalsukan BBM yang berada di wilayah SPBU yang mana hal ini sangat meresahkan banyak pihak, banyak dari masyarakat yang mengaku bahwa BBM yang dibeli kurang sesuai dengan kuantitas BBM itu sendiri, juga pelaku usaha khususnya di bidang SPBU dalam memperkaya diri dengan cara instan adalah berbuat curang dengan memanipulasi atau mencampur takaran BBM jenis Paltalite dengan BBM jenis Premium yang mereka lakukan pada waktu pengisian BBM di tangki kendaraan konsumen. Dengan begitu maka keuntungan para pelaku usaha akan lebih meningkat dan sebaliknya konsumen akan dirugikan dengan adanya hal tersebut. Padahal barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran. Negara dalam hal

ini khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum. Salah satu ancaman hukuman tersebut ialah sanksi pidana. Perumusan UU Migas ini pun memuat ketentuan pidana. Adapun ketentuan-ketentuan pidana tersebut terdapat dalam bab XI yaitu Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.

Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Salah satu kasus meniru atau memalsukan BBM oleh oknum SPBU terjadi di SPBU No 34.43213 milik H. MUCHJIDIN yang beralamat di Jl. Raya Sukanagara, Kec. Sukanagara, Kab.Cianjur yang mana dugaan tindak pidana tersebut terjadi dengan adanya kegiatan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premium untuk dijual dengan harga BBM jenis Peralite. Kegiatan yang dilakukan oleh saudara IRWAN yaitu mencampurkan bahan bakar minyak BBM Jenis BBM Jenis Bensin RON 90 (Peralite) dicampur dengan BBM Jenis Bensin RON 88 (Premium) untuk dijual

dengan harga BBM jenis Pertalite tidak diperbolehkan karena tindakan tersebut merupakan kegiatan pemalsuan BBM yang merupakan tindak pidana dan merugikan masyarakat, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh saudara IRWAN yakni patut diduga merupakan tindak pidana.

Cara pencampuran BBM yang dilakukan adalah pada saat mobil tangki Pertamina yang mengangkut BBM Jenis Premium dan BBM jenis Pertalite datang ke SPBU No. 34.43213, kemudian dilakukan curah atau penurunan BBM jenis Pertalite ke dalam tangki tanam BBM jenis Pertalite sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, selanjutnya diturunkan BBM Jenis Premium ke tangki tanam BBM Jenis Pertalite kurang lebih 1.000 (seribu) liter, kemudian pelaku menjual BBM jenis Pertalite yang sudah dicampur dengan BBM jenis Premium dengan harga Rp. 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter.

Akibat kerugian yang diderita konsumen tersebut penulis bermaksud membahas topik ini. Oleh sebab itu perlindungan konsumen terhadap turunnya kualitas dan kuantitas produk BBM di SPBU Daerah Jawa Barat ini merupakan topik yang perlu diteliti. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penulisan Hukum dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“TINDAK PIDANA PENIRUAN ATAU PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OLEH OKNUM STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang di alami konsumen akibat kecurangan pengisian Bahan Bakar Minyak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan PT. Pertamina dan POLDA JABAR terhadap tindak pidana Peniruan atau Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh oknum spbu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang di alami konsumen akibat kecurangan pengisian Bahan Bakar Minyak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana peniruan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pertamina Bandung POLDA JABAR.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana.



- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan referensi dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi, terutama bagi para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan Tindak Pidana pelaku yang meniru atau memalsukan BBM oleh oknum SPBU.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *rechtsstaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *Machtsstaat*, prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yang ingin ditegakan dalam negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.<sup>4</sup> Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 Bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang, berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta

---

<sup>4</sup>[www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum](http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum). Diunduh pada Kamis 11 Mei 2018 pukul 18.30 WIB.

dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa :<sup>5</sup>

“hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukm dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum”.

Menurut Suharto yang dikutip oleh R. Abdussalam menjelaskan bahwa :<sup>6</sup>

“penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat”.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo. 2005.*Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung. Hal. 24

<sup>6</sup> *Ibid* hal.25

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Pada hakekatnya setiap Tindakan pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.<sup>7</sup> Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

Hukum mempunyai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.<sup>8</sup> Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.110.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm.115.

masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>9</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat<sup>10</sup>.

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari \ Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.9.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011 hlm. 23.

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid* hlm. 30.

Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta

memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum<sup>12</sup>.

Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau *law as a tool of social engineering* atau sarana pembangunan dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut<sup>13</sup> :

“Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV bahwa<sup>14</sup> :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Salah satu bidang kehidupan yang kemudian juga dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan adalah penyelenggaraan kegiatan di bidang Minyak Bumi dan Gas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan penyelenggaraannya pada kegiatan usaha hulu. Sedangkan pada kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pemerintah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi termasuk salah satu undang-undang yang mengatur kaidah-kaidah hukum dalam lingkup hukum administrasi negara.

Hal ini dilihat dari aturan-aturan perizinan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau

---

<sup>14</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 31.



bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran. Negara dalam hal ini khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 (1) Bahwa “Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah” sehingga spesifikasi BBM yang dijual oleh Penyalur (SPBU dan SPBN) PT. PERTAMINA harus sesuai dengan ketentuan.

Dalam hukum pidana, dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.”

Asas legalitas tersebut mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang ;
2. Larangan terhadap penafsiran terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 3.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non reretro aktif.

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga menjadi dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas suatu peristiwa yang tidak dengan tegas diatur dan diuraikan dalam Undang-Undang. Di era persaingan bebas sekarang ini menjadi pertanyaan besar bagi peneliti terhadap keseriusan para pelaku usaha di SPBU Pertamina dalam menerapkan Permen ESDM No.19 Tahun 2008 dan dalam menerapkan prinsip usaha yang fair dan beritikad baik. Dahulu tidak mengherankan jika muncul ungkapan populer “Konsumen adalah Raja”<sup>16</sup>. Namun sangat disayangkan kalimat konsumen adalah raja saat ini mulai pudar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan bahkan ibarat dalil kosong atau mitos belaka. Sekarang ini pihak distributor dan produsenlah yang menentukan, mendikte, bahkan memaksa konsumen untuk membelanjakan uangnya untuk apa, kapan, berapa dan dalam cara bagaimana. Dan mereka memang akan mengusahakan demikian selamanya dengan segala cara baik survey, riset, penyebaran iklan secara besar-besaran bahkan dengan menabrak regulasi yang ada demi memaksa kita membeli produk mereka.

Dalam transaksi pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU Pertamina tidaklah patut menerapkan prinsip ekonomi dengan modal sedikit-dikitnya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena SPBU Pertamina yang merupakan

---

<sup>16</sup> Roem Topatimasang, Mansour fakih dan Wijanarka E.S, *Menggeser Neraca Kekuatan “Panduan Latihan Pendidikan Konsumen Untuk Pemula”*. (Jakarta:YLKI,1990), hlm.2

kepanjangan tangan dari Badan Usaha Pemerintah dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus menerapkan prinsip menumbuhkan Nasionalisme kepada pelanggannya dengan pelayanan yang berkualitas, bersaing dan professional dengan segala kelebihan dan keunggulan yang ada.

Jika dilihat nilai keadilan kepada konsumen seharusnya pelaku juga dimintai pertanggungjawaban materi atas nilai kerugian yang konsumen alami sebagaimana yang tercantum dalam Pasal (7) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 bahwa :

“Pelaku usaha wajib memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.”

Pelanggaran pelaku usaha tersebut tidak sejalan dalam tujuan Perlindungan Konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
5. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Di sisi lain ada pelanggaran perlindungan hukum terhadap konsumen, yang juga berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut juga telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelanggaran pelaku usaha juga bertentangan dalam Pasal 28 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai kegiatan usaha hilir pelaku usaha BBM baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar
3. Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Mudik Minyak dan Gas Bumi sanksi atas tindakan kecurangan ketidaksesuaian takaran hanya bersifat administratif, baik dimulai dari penangguhan izin hingga pencabutan izin.

Dalam hal untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum tentunya semua peraturan yang ada di Indonesia bertujuan untuk kepastian hukum yang menunjang kesejahteraan rakyatnya seperti halnya konsumen, hak dan kewajiban konsumen dilindungi oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil dan formil semakin terasa sangat penting, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting. Pada masa perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan yang jujur dimana konsumen dapat memilih barang atau jasa dengan jaminan mutu bagus dan harga yang wajar. Oleh karena itu pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola kerjasama antar pelaku usaha atau antara pihak yang berkepentingan agar terciptanya suatu perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan yang jujur.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

##### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala ketidakpastian hukum, Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan<sup>17</sup>:

“Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”

Peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 97.

memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan dalam hal Tindak pidana pelaku peniruan atau pemalsuan BBM oleh oknum SPBU dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk kemudian dianalisis.

## 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis-normatif dengan menganalisa undang-undang yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro<sup>18</sup> :

“Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan perundangan satu dengan peraturan perundangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek. “

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan ditunjang oleh studi lapangan mengenai permasalahan yang terjadi di dalam dunia bisnis pelaku badan usaha berkenaan dengan masalah Tindak pidana pelaku yang meniru atau memalsukan BBM oleh oknum SPBU dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tahapan yaitu:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 97.

- a. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat ;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu<sup>19</sup> :

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 52.



“Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum.”

Bahan hukum tersebut memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan kasus yaitu meniru atau memalsukan BBM oleh pelaku usaha SPBU.

### 3. Bahan Hukum Tersier yaitu<sup>20</sup>:

“Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.” Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

#### b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-dokum kasus, tabel dan wawancara.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan :

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 53.

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum tersier seperti buku, koran.
- b. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data-data primer sebagai penunjang data sekunder, dengan melakukan wawancara untuk memperoleh keterangan yang akan mendukung terhadap studi data primer yang dilakukan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

- a. Data kepustakaan yaitu studi dokumen dengan cara mempelajari materi-materi berupa catatan-catatan, literatur, catatan perundangundangan, dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (komputer/laptop) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.
- b. Data Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data berkaitan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto :<sup>21</sup>

“Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 228

sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan”.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta menggali nilai hukum yang hidup dimasyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil peneltian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas.

## 7. Lokasi Penelitian

Guna menyelesaikan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yang dianggap sesuai, antara lain sebagai berikut:

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Gedung Mochtar Kusumaadmadja Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

### b. Instansi

- 1) Polda Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No.748 Cimencrang, Gede Bage Kota Bandung.